



KOORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Jalan Soekarno-Hatta No.714 Tlp. (022) 7810365 Fax. (022) 7810349 Bandung
Website: www.pta-bandung.go.id email: surat.ptajabar@gmail.com

Nomor : W10-A/3046/PL.01/IX/2022 Bandung, 20 September 2022
Lamp. : 1 (satu) bundel
Perihal : Validasi Data BMN Berupa Tanah pada Master Aset SIMAN

- Yth. 1. Sekretaris Pengadilan Tinggi Bandung
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Se-Wilayah Jawa Barat
3. Sekretaris Pengadilan Agama Se-Wilayah Jawa Barat
4. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
5. Sekretaris Pengadilan Militer-II Bandung

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat Nomor S-245/WKN.08/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka penuntasan percepatan program pensertifikatan BMN berupa tanah dan Kebijakan Satu Peta (KSP) diperlukan :
 - a. Data tanah yang handal yang sesuai fakta di lapangan, antara lain terkait status bidang tanah bersertifikat atau belum bersertifikat dan *clean and clear* atau *non clean and clear* (antara lain : masuk Kawasan hutan, sengketa, berperkara);
 - b. Titik koordinat bidang tanah dimaksud.
2. Data BMN berupa tanah sudah tersedia di master asset SIMAN, namun data/informasi tanah tersebut belum lengkap;
3. Satuan kerja agar melengkapi/updating data tanah pada master asset SIMAN. Khususnya dalam rangka percepatan program sertifikasi dan Kebijakan Satu Peta, data/informasi yang diminta untuk dilengkapi sebagai berikut :
 - a. Dokumen kepemilikan;
 - b. Jenis dokumen kepemilikan;
 - c. Jenis sertifikat (bila sudah bersertifikat);
 - d. Nomor dokumen kepemilikan;
 - e. Tanggal dokumen kepemilikan;
 - f. Berlaku sampai (bila ada);
 - g. No bidang;
 - h. Luas bidang pada dokumen kepemilikan;
 - i. Atas nama pada dokumen kepemilikan;

- j. Instansi penerbit dokumen kepemilikan;
 - k. Status belum bersertifikat;
 - l. Tahun target (bila ada);
 - m. Keterangan bidang tanah;
 - n. Titik koordinat BMN berupa tanah;
 - o. File dokumen kepemilikan bidang tanah.
4. Agar satuan kerja melakukan monitoring terkait kelengkapan data/informasi tanah dimaksud, melalui tools Monitoring Sertifikasi Tanah yang dapat diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman/moserah> (monserah);
5. Panduan verifikasi/validasi dapat diakses pada link berikut: <https://linktr.ee/panduanterkaitmonserah>.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sekretaris selaku Koordinator Wilayah Jawa Barat,



Tembusan Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung (sebagai Laporan);
3. Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Jawa Barat;
4. Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Jawa Barat;
5. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
6. Kepala Pengadilan Militer II Bandung.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
JAWA BARAT

GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDUNG, JALAN ASIA AFRIKA NOMOR 114 BANDUNG 40261; TELEPON: (022) 4213616; FAKSIMILE: (022) 4213607; SUREL: KANWILDJKN8@KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-245/WKN.08/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Validasi Data BMN Berupa Tanah pada Master Aset SIMAN

18 Agustus 2022

2500

Yth. Daftar Terlampir
Di
Tempat

Menindaklanjuti nota dinas Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara nomor: ND-21/KN/KN.2/2022 tanggal 04 Juli 2022 hal Validasi Data BMN Berupa Tanah pada Master Aset SIMAN, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka penuntasan percepatan program pensertipikatan BMN berupa tanah dan Kebijakan Satu Peta (KSP) diperlukan:
 - a. data tanah yang handal yang sesuai fakta di lapangan, antara lain terkait status bidang tanah bersertipikat atau belum bersertipikat dan *clean and clear* atau *non clean and clear* (antara lain: masuk kawasan hutan, sengketa, berperkara), dan
 - b. titik koordinat bidang tanah dimaksud.
2. Bahwa Data BMN berupa tanah sudah tersedia di master aset SIMAN, namun demikian data/informasi tanah dimaksud perlu dilengkapi oleh satuan kerja, sehingga dapat mendukung percepatan program pensertipikatan BMN berupa tanah dan Kebijakan Satu Peta.
3. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara telah meminta pimpinan Kementerian/Lembaga untuk menginstruksikan satuan kerja agar melengkapi/updating data tanah pada master aset SIMAN. Khususnya dalam rangka percepatan program sertifikasi dan Kebijakan Satu Peta, data/informasi yang diminta untuk dilengkapi sebagai berikut:
 - a. Dokumen kepemilikan;
 - b. Jenis dokumen kepemilikan;
 - c. Jenis sertipikat (bila sudah bersertipikat);
 - d. Nomor dokumen kepemilikan;
 - e. Tanggal dokumen kepemilikan;
 - f. Berlaku sampai (bila ada);
 - g. No bidang;
 - h. Luas bidang pada dokumen kepemilikan;
 - i. Atas nama pada dokumen kepemilikan;
 - j. Instansi penerbit dokumen kepemilikan;
 - k. Status belum sertipikat;
 - l. Tahun target (bila ada);
 - m. Keterangan bidang tanah;
 - n. Titik koordinat BMN berupa tanah;
 - o. File dokumen kepemilikan bidang tanah.

4. Sebagaimana...

4. Sebagaimana poin nomor 1 s.d. 3 di atas, kami mengimbau kepada Saudara untuk menginstruksikan satuan kerja yang berada di wilayah kerja Saudara untuk melakukan monitoring terkait kelengkapan data/informasi tanah dimaksud, melalui *tools* Monitoring Sertifikasi Tanah yang dapat diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman/monserah> (**monserah**).
5. Adapun Panduan verifikasi/validasi dapat diakses pada <https://linktr.ee/panduanterkaitmonserah>.

Kanwil DJKN Jawa Barat berkomitmen, konsisten dan kontinu mengimplementasikan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam kegiatan keseharian melalui pelayanan yang ramah, efisien, efektif dan akuntabel, serta dilaksanakan dengan sepenuh hati yang dilandasi keikhlasan melakukan yang terbaik.

Atas perhatian Saudara/Saudari, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Jawa
Barat



Ditandatangani secara elektronik
Tavianto Noegroho

Tembusan:
Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

